BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Model Penelitian Terdahulu

Penelitian Ho dan Wong (2001) menggunakan Hongkong sebagai tempat penelitian untuk menganalisis apakah perusahaan-perusahaan di Hongkong yang dikuasai oleh keluarga, memiliki komite audit dan dualisme ketua dewan/CEO melakukan pengungkapan sukarela. Sampel yang digunakan adalah laporan tahunan perusahaan terdaftar di Hongkong dari tahun 1997 sampai tahun 2000. Variabel independen yang digunakan adalah komite audit, proporsi direksi non eksekutif, kepribadian dominan dan anggota dewan keluarga, sedangkan variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan dan *leverage*.

Peneliti lain yang juga menggunakan Hongkong sebagai sampel adalah Chau dan Gray (2002). Tujuan penelitiannya adalah untuk meneliti hubungan struktur kepemilikan terhadap pengungkapan sukarela. Sampel yang digunakan adalah data perusahaan terpilih yang bergerak di sektor industri makanan dan minuman, pengiriman dan transportasi, penerbitan dan percetakan, elektronik dan teknologi serta bahan bangunan dan konstruksi. Semua perusahaan tersebut merupakan perusahaan industri yang sahamnya telah dicatatkan di *Stock Exchange Hongkong* (SEKH) di Hongkong dan Singapura pada tanggal 31 Desember 1997.

Haniffa dan Cooke (2002) melakukan penelitian mengenai pengaruh kebudayaan dan pemerintahan terhadap faktor pengungkapan pada perusahaan yang berada di Malaysia. Penelitian dilakukan terhadap 167 perusahaan non

Nurapnita Rozalia Inda, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2014

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Kuala Lumpur (*Kuala Lumpur Stock Exchange*) dan telah menyelesaikan laporan tahunan pada tahun 1994. Berbeda dengan peneliti di atas, konsep penelitian pengungkapan sukarela oleh Ghazali dan Weetman (2006) bertujuan untuk menilai apakah reaksi peraturan setelah krisis ekonomi meningkatkan kesadaran pengungkapan sebagai alat tata kelola perusahaan dan mengurangi pengaruh dominasi kepemilikan keluarga. Sampel yang digunakan sebanyak 812 perusahaan selama tahun 2001.

Peneliti lain yang juga mengambil sampel perusahaan terdaftar di *Kuala Lumpur Stock Exchange* (KLSE) adalah Hashim dan Saleh (2003), Ghazali dan Weetman (2006), Jaffar, Jamaludin, dan Rahman (2007), dan Muhamad *et al*. (2009). Variabel-variabel yang digunakan para peneliti tersebut diantaranya jumlah pemegang saham (Ghazali & Weetman, 2006), komite audit (Muhamad *et al*., 2009), kepemilikan *blockholder* (Jaffar, Jamaluddin & Rahman, 2007; Samaha *et al.*, 2012), kepemilikan saham manajerial (Ghazali & Weetman, 2006; Jaffar, Jamaluddin & Rahman, 2007; Zourarakis, 2009), dan kepemilikan pemerintah (Jaffar, Jamaluddin & Rahman, 2007). Variabel lainnya yaitu anggota dewan keluarga (Haniffa & Cooke, 2002; Ghazali & Weetman, 2006), direksi non eksekutif (Haniffa & Cooke, 2002; Ghazali & Weetman, 2006), ukuran perusahaan (Ghazali & Weetman, 2006; Muhamad *et al.*, 2009), profitabilitas (Hashim dan Saleh, 2003; Ghazali & Weetman, 2006; Muhamad *et al*., 2009), *leverage* (Muhamad *et al.*, 2009), dan jenis industri (Muhamad *et al.*, 2009).

Beberapa tahun berikutnya, Hossain (2008) melakukan penelitian empiris terhadap pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan terdaftar di *Bombay*

Stock Exchange (BSE). Variabel yang digunakan adalah umur perusahaan, ukuran perusahaan (Barako, Hancock & Izan, 2006), profitabilitas (Chau & Gray, 2002; Barako *et al.*, 2006), aset ditempat, dan komposisi dewan (Barako, Hancock & Izan, 2006). Di tahun yang sama, Al-Shammari (2008) meneliti dengan menambahkan variabel auditor (Agca & Onder, 2007), *leverage* (Barako, Hancock & Izan, 2006), dan jenis industri.

Situmorang dan Mukodim (2008) melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan sukarela *(voluntary disclosure)* pada pelaporan tahunan perusahaan yang termasuk dalam perusahaan LQ45. Periode penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari 2008 sampai dengan Juli 2008. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan (Sudarmadji & Sularto, 2007), rasio *leverage* (Sudarmadji & Sularto, 2007), basis perusahaan, struktur kepemilikan, umur perusahaan (Alsaeed, 2006), *return on equity*, dan *price to book value*.

Tahun yang sama, Hardiningsih (2008) melakukan penelitian dengan mengembangkan penelitian Mujiyono dan Nany (2006) mengenai pengaruh *leverage*, likuiditas, dan porsi kepemilikan saham publik terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Variabel lain yang ditambahkan Hardiningsih (2008) adalah basis perusahaan, *return on investment* (ROI), dan ukuran perusahaan. Sampel penelitian ini adalah 66 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2004 sampai 2005.

Penelitian studi empiris terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela di Qatar dilakukan oleh Hossain dan Hammami (2009).

Laporan tahunan diambil dari 25 perusahaan yang terdaftar di *Doha Securities Market* (DSM). Faktor-faktor yang diteliti adalah umur perusahaan, ukuran perusahaan (Agca & Onder, 2007), profitabilitas (Agca & Onder, 2007; Yuen, Liu, Zhang, & Lu, 2009; Zourarakis, 2009), kompleksitas, dan aset di tempat.

Bogdan, Popa, Pop dan Farcane (2009) menguji konsep struktur kepemilikan pada perusahaan terdaftar di Romania. Variabel yang digunakan adalah kepemilikan institusional (Eng & Mak, 2003; Barako, Hancock & Izan, 2006), kepemilikan asing (Barako, Hancock & Izan, 2006), dan kepemilikan pemerintah (Eng & Mak, 2003; Makijah & Patton, 2007). Konsep tersebut oleh Alves, Rodrigues dan Canadas (2012) ditambah dengan kepemilikan manajerial (Eng & Mak, 2003; Agca & Onder, 2007; Rouf & Harun, 2011), ukuran perusahaan (Ho & Lee, 2012; Wardani, 2012), *leverage* (Ho & Lee, 2012; Wardani, 2012; Yuen *et al.*, 2009; Zourarakis, 2009), dan profitabilitas (Khodadadi *et al.*, 2010; Ho & Lee, 2012). Sampel yang digunakan dalam penelitian Alves *et al*. (2012) adalah laporan tahunan 140 perusahaan yang terdaftar di Iberia Peninsula yang terdiri dari 38 perusahaan Portugal dan 102 perusahaan Spanyol.

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh tata kelola perusahaan terhadap luas pengungkapan sukarela juga telah banyak dilakukan. Peneliti tersebut diantaranya Ahmed dan Courtis (1999), Alsaeed (2006), Dahawy dan Conover (2007), Binh (2012), Nekhili, Boubaker dan Lakhal (2012), Damagun dan Chima (2013), dan Omran dan Abdelrazik (2013).

2.2 Pengungkapan Sukarela

Pengungkapan secara sederhana didefinisikan sebagai penyampaian informasi. Pengungkapan secara konseptual merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan dan secara teknis merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi. Proses akuntansi yang dimaksud adalah penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan, dimana tujuan pengungkapan adalah melindungi, memberikan informasi dan tujuan kebutuhan khusus (Suwardjono, 2010).

Penjelasan lebih lanjut dilakukan oleh Suwardjono (2010) bahwa pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku sehingga perusahaan bebas memilih jenis informasi yang ingin diungkapkan. Meskipun bebas, informasi yang diberikan harus relevan, serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Pengungkapan sukarela yang dilakukan akan memberikan dampak positif/nilai tambah bagi perusahaan.

Meek, Robert, dan Gray (1995) dalam Hardiningsih (2008) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela merupakan pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan. Manajemen dapat memilih jenis informasi yang akan diungkapkan yang dipandang relevan untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang memakainya. Pengungkapan sukarela juga dapat diartikan sebagai pengungkapan butir-butir yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku.

Namun demikian, relevansi informasi dalam pengungkapan sukarela harus dijunjung tinggi, agar laporan yang diberikan tidak menyesatkan. Menurut Hendriksen (2001) dalam Sudarmadji dan Sularto (2007), beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan sukarela adalah:

a. Untuk siapa informasi diungkapkan
b. Apa tujuan informasi tersebut
c. Berapa banyak informasi yang harus diungkapkan

Menurut Akhtaruddin, Hossain, Hossain, dan Yao (2009), perusahaan yang melakukan pengungkapan biasanya dipengaruhi oleh faktor biaya dan manfaat. Pengungkapan informasi akan dilakukan secara sukarela apabila manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya. Manfaat tersebut diperoleh karena pengungkapan informasi oleh perusahaan akan membantu investor dan kreditur dalam memahami risiko investasi.

Di Indonesia, pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bagi emiten atau perusahaan publik industri manufaktur telah ditetapkan melalui Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan nomor: SE-02/PM/2002 tanggal 27 Desember 2002. Selain pedoman di atas, tata cara penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik juga telah diatur. Keputusan ini mengatur tentang pengungkapan wajib yang harus dipenuhi oleh perusahaan publik. Terakhir, keputusan ini diperbaharui pada tanggal 1 Agustus 2012 dengan nomor: KEP-431/BL/2012. Pengungkapan diluar dari yang diwajibkan, disebut dengan pengungkapan sukarela (Hardiningsih, 2008). Pengungkapan sukarela dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh

perkembangan ekonomi, sosial budaya, teknologi informasi, kepemilikan perusahaan, dan perubahan peraturan (Situmorang & Mukodim, 2008).

2.3 Struktur Kepemilikan

Definisi struktur kepemilikian menurut Haniffa dan Cook (2002) serta Eng dan Mak (2003) adalah mekanisme yang sejalan dengan kepentingan pemegang saham dan manajer. Mekanisme tersebut merupakan komitmen dari para pemegang saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada para manajer. Struktur kepemilikan mencerminkan proporsi hak pemilik.

Struktur kepemilikan menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah struktur kepemilikan saham, yaitu perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh *insiders* dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor dimana dalam melaksanakan kegiatannya, prinsipal (pemegang saham) memberikan wewenang kepada agen (direksi) dalam pengambilan keputusan. Struktur kepemilikan memiliki motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan, manajemen, serta dewan direksinya, dan dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan dan mempengaruhi kinerja perusahaan.

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan *Blockholder* terhadap Pengungkapan Sukarela

Menurut Bogdan *et al.* (2009) dan Juhmani (2013), kepemilikan *blockholder* adalah proporsi saham yang dimiliki pemegang saham utama dengan kepemilikan saham minimal 5% pada suatu perusahaan. Besarnya kepemilikan saham *blockholder* berarti saham dikendalikan oleh sekelompok kecil orang, yang berarti kepemilikan akan terkonsentrasi. Kepemilikan yang terkonsentrasi berfungsi

sebagai mekanisme pengawasan yang efisien untuk mencegah manajer mengambil alih sumber daya untuk kepentingan pribadi. Hasil penelitian Chau dan Gray (2002) menunjukkan signifikan negatif. Perusahaan-perusahaan Asia di Hongkong yang dikendalikan oleh sebagian kecil orang memiliki sedikit motivasi dalam mengungkapan informasi diluar dari yang dipersyaratkan. Permintaan untuk pengungkapan publik relatif lemah bila dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kepemilikan yang lebih luas. Hasil yang konsisten juga diperoleh dari penelitian Barako *et al.* (2006), Zourarakis (2009), Samaha *et al.* (2012), dan Juhmani (2013).

Penelitian Eng dan Mak (2003) menjelaskan pengaruh yang tidak signifikan antara kepemilikan *blockholder* terhadap pengungkapan sukarela perusahaan di Singapura. Biasanya pengungkapan sukarela disediakan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Jumlah *blockholder* yang cenderung sedikit menyebabkan pengungkapan sukarela menjadi lebih rendah karena *blockholder* mengharapkan informasi langsung diberikan oleh manajemen.

Konsisten dengan Eng dan Mak (2003), hasil penelitian Haniffa dan Cooke (2002) dan Jaffar *et al.* (2007) menunjukkan bahwa kepemilikan *blockholder* memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Hal ini disebabkan kegagalan *blockholder* untuk memantau kegiatan operasi dan pelaporan perusahaan.

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan Sukarela

Kepemilikan manajerial berarti bahwa sebagian besar saham dimiliki oleh manajemen perusahaan. Untuk menyelaraskan kepentingan antara pemilik dan agen (manajer), solusi yang memungkinkan adalah memberikan manajer

kepemilikan saham. Manajer yang ikut memiliki saham perusahaan mempunyai motivasi untuk meningkatkan kekayaan perusahaan, sehingga keterbukaan informasi akan meningkat (Juhmani, 2013). Pernyataan di atas konsisten dengan hasil penelitian Agca dan Onder (2007), Zourarakis (2009), dan Alves *et al.* (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan sukarela.

Penelitian yang dilakukan oleh Jaffar *et al.* (2007) melibatkan kepemilikan manajerial terhadap pengaruh kualitas pelaporan dalam laporan tahunan perusahaan di Malaysia. Hasil penelitian Jaffar *et al.* (2007) konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Eng dan Mak (2003) dan Nekhili *et al.* (2012). Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan manajerial mengurangi kebutuhan akan pengungkapan sukarela karena manajer dapat memperoleh informasi langsung dari perusahaan.

Hasil lainnya dikemukakan oleh Akhtaruddin *et al.* (2009), Baek *et al.* (2009) dalam Alves *et al*. (2012), Uyar, Kilic, dan Bayyurt (2011), serta Rouf dan Harun (2011) yang menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah, kurang dalam memperhatikan pengungkapan informasi.

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Pengungkapan Sukarela

Kepemilikan pemerintah oleh Juhmani (2013) diartikan sebagai kepemilikan saham yang ikut dimiliki oleh pemerintah pada sebuah perusahaan. Penelitian Ghazali dan Weetman (2006) membuktikan bahwa kepemilikan pemerintah di Malaysia tidak membuat pengungkapan lebih besar dan transparansi yang lebih baik. Ghazali dan Weetman (2006) berpendapat bahwa di negara berkembang,

perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah selalu terkait dengan hal-hal politis sehingga perusahaan cenderung kurang dalam pemberian informasi untuk melindungi hubungan politik mereka.

Al-Janadi *et al.* (2013) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah di negara Arab Saudi sangat terkonsentrasi karena sebagian besar perusahaan terdaftar adalah keluarga atau perusahaan yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah Arab Saudi masih memegang lebih dari 30% dari emiten Saudi. Hasilnya, kepemilikan pemerintah memiliki dampak negatif pada pengungkapan sukarela.

Hasil penelitian yang diungkapkan oleh Makhija dan Patton (2004) dan Bogdan *et al.* (2009) menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepemilikan pemerintah dengan pengungkapan sukarela. Hal ini berdasarkan argumen bahwa pemerintah Arab Saudi tidak memiliki kepentingan dalam memberikan informasi yang memadai. Oleh karena itu, kepemilikan pemerintah harus dikurangi sehingga mendorong perusahaan terdaftar secara efektif berlatih sistem tata kelola perusahaan termasuk memberikan informasi sukarela secara lebih luas.

Berbeda dengan peneliti-peneliti di atas, Eng dan Mak (2003) menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah yang signifikan di Singapura memiliki kecenderungan peningkatan dalam mengungkapkan informasi. Pemerintah harus mempertimbangkan pembangunan yang komprehensif dari industri dan masyarakat.

Jaffar *et al.* (2007) dalam penelitiannya mengenai faktor penentu yang mempengaruhi kualitas pelaporan dalam laporan tahunan perusahaan di Malaysia menunjukkan hubungan yang signifikan positif diantara kepemilikan pemerintah terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Hal ini memberikan sinyal kepada publik bahwa kepemilikan oleh pemerintah telah mendorong perusahaan untuk lebih transparan dan bertanggung jawab kepada publik. Temuan ini juga menegaskan bahwa peran pengawasan yang dimainkan oleh pemerintah menyebabkan peningkatan pada pengungkapan sukarela.

Konsisten dengan Eng dan Mak (2003) dan Jaffar *et al.* (2007), dalam sejumlah besar negara, pemerintah memiliki partisipasi modal di beberapa perusahaan yang strategis menurut negara. Perusahaan-perusahaan ini dijalankan seperti perusahaan swasta lainnya, tetapi juga memiliki tujuan yang terkait dengan kepentingan bangsa. Tujuan ini dapat bertentangan dengan tujuan komersial perusahaan. Untuk itu dibutuhkan komunikasi dengan pemegang saham lainnya di perusahaan. Ini berdampak pada pengungkapan sukarela yang semakin meningkat (Alves *et al.*, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Yuen *et al.* (2009) dan Lan *et al.* (2013) meneliti studi kasus pengungkapan sukarela perusahaan di Cina menyimpulkan bahwa kepemilikan pemerintah memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Pemerintah Cina telah mendorong pelepasan informasi sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan reputasi Cina di mata internasional. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah menyediakan transparansi keuangan dengan melakukan pengungkapan informasi yang memadai

tentang operasional perusahaan kepada pemegang saham. Perusahaan juga berkewajiban mengikuti standar akuntansi internasional untuk memenuhi persyaratan terdaftar di bursa efek luar negeri.

2.4 Variabel Kontrol

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Sukarela

Ukuran perusahaan berkaitan dengan pengungkapan yang dilakukan dalam rangka penawaran umum (*go public*). Secara umum, perusahaan besar akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak daripada perusahaan kecil karena menyangkut beberapa hal (Fitriani, 2001 dalam Hardiningsih, 2008). Hal ini dikarenakan perusahaan besar merupakan entitas yang banyak disorot publik. Pengungkapan lebih banyak informasi merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Perusahaan kecil pada umumnya berada pada persaingan yang ketat, sehingga mengungkapkan jati dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisi perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan kecil tidak melakukan pengungkapan seperti layaknya perusahaan besar (Hardiningsih, 2008).

Hasil penelitian Hossain (2008) menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki kebutuhan pengungkapan yang lebih luas karena memberikan efek pertukaran jaringan yang lebih besar. Argumen lain, pemegang saham sebuah perusahaan kecil cenderung lebih percaya pada manajemen daripada pemegang saham pada perusahaan besar, sehingga dibutuhkan pengungkapan yang lebih

luas. Hal ini menandakan bahwa terdapat pengaruh positif antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan sukarela.

Ukuran perusahaan ditemukan secara signifikan dan berkorelasi positif dengan tingkat pengungkapan dalam sejumlah penelitian. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar mengungkapkan informasi lebih lanjut, baik yang wajib maupun sukarela, daripada perusahaan kecil. Fakta menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki pengungkapan sukarela lebih luas karena mereka membutuhkan modal pembiayaan lebih besar daripada perusahaan kecil. Selain itu, perusahaan besar yang diawasi ketat oleh investor, memiliki kemampuan untuk menyerap biaya tambahan untuk pengungkapan yang lebih luas (Alves *et al.*, 2012).

Hasil penelitian di atas konsisten dengan Agca dan Onder (2007), Barako (2007), Jaffar *et al.* (2007), Situmorang dan Mukodim (2008), Muhamad *et al.* (2009), Yuen *et al.* (2009). Hasil konsisten lain dinyatakan dalam penelitian Mujiyono dan Nany (2010), Uyar *et al.* (2011), Wardani (2012), Al-Janadi *et al.* (2013), dan Juhmani (2013) yang juga meneliti topik yang sama. Namun, hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Sudarmadji dan Sularto (2007), Zourarakis (2009), dan Rouf (2011).

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Pengungkapan Sukarela

Tingkat pengelolaan hutang (*leverage*) berkaitan dengan bagaimana perusahaan didanai, apakah perusahaan didanai lebih banyak menggunakan hutang atau modal yang berasal dari pemegang saham (Hardiningsih, 2008). Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan maka akan semakin besar pula

kemungkinan terjadinya transfer kemakmuran dari kreditur jangka panjang kepada pemegang saham dan manajer, sehingga perusahaan dituntut melakukan pengungkapan yang lebih luas guna memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang (Meek *et al.*,1995 dalam Hardingisih, 2008).

Definisi *leverage* menurut Agca dan Onder (2007) adalah persentase jumlah hutang dibagi dengan jumlah aktiva yang digunakan untuk memeriksa struktur keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk mengungkapkan informasi kepada penyedia pinjaman dan pemangku kepentingan lainnya.

Pengaruh positif terjadi antara *leverage* dengan pengungkapan sukarela. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi perlu mengungkapkan informasi rinci kepada para pemangku kepentingan dan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang (Juhmani, 2013). *Leverage* ditemukan memiliki kekuatan penjelas dalam lingkungan perusahaan dan informasi keuangan. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi dapat mengungkapkan informasi lebih lanjut untuk memenuhi tuntutan dari pemegang saham untuk menilai arus kas masa depan perusahaan dan karena risiko ekuitas yang lebih tinggi (Al-Shammari, 2008).

Ahmed dan Nicholls (1994) berpendapat bahwa di negara-negara di mana lembaga keuangan merupakan sumber utama dana perusahaan, ada harapan bahwa perusahaan yang memiliki sejumlah besar hutang pada neraca akan mengungkapkan lebih banyak informasi dalam laporan tahunannya. Perusahaan-perusahaan tersebut cenderung mengungkapkan informasi rinci untuk

meningkatkan kesempatan mendapatkan dana dari lembaga keuangan. Pendapat yang konsisten juga dijelaskan oleh Muhamad *et al.* (2009) dan Juhmani (2013).

Hasil penelitian yang berlawanan ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lan *et al.* (2013). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Peneliti lain yang memiliki hasil tidak signifikan adalah Jaffar *et al.* (2007), Sudarmadji dan Sularto (2007), Situmorang dan Mukodim (2008), Mujiyono dan Nany (2010), dan Wardani (2012).

2.4.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Sukarela.

Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007), definisi profitabilitas adalah suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan.

Profitabilitas perusahaan menunjukkan kinerja pengelolaan perusahaan yang baik. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan tingginya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Dengan profitabilitas yang tinggi, manajer perusahaan akan melakukan pengungkapan lebih banyak untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang dikelolanya (Kartika, 2009). Hal lain yang mendukung hubungan positif antara tingkat pengungkapan sukarela dengan profitabilitas adalah upaya perusahaan untuk membedakan kinerja perusahaan dengan kompetitor lain yang memiliki profitabilitas lebih rendah sehingga memudahkan pengumpulan dana (Khodadadi *et al.*, 2010).

Hasil penelitian Al-Janadi *et al*. (2013) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara profitabilitas dengan pengungkapan sukarela. Perusahaan yang menguntungkan dianggap dalam kondisi baik dan memiliki insentif untuk membedakan diri dari perusahaan yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, perusahaan yang menguntungkan secara sukarela cenderung menunjukkan pengungkapan yang lebih rinci untuk mempromosikan berbagai kegiatan mereka dan diharapkan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak daripada perusahaan yang kurang menguntungkan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Hossain (2008), Akhtaruddin *et al.* (2009), Zourarakis (2009), dan Wardani (2012).

Berbeda dengan peneliti di atas, penelitian Juhmani (2013) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian Ho dan Wong (2001), Hashim dan Saleh (2007), Sudarmadji dan Sularto (2007), Al-Shammari (2008), dan Hossain dan Hammani (2009).

2.5 Model Penelitian

Penelitian ini merupakan adopsi dari penelitian Juhmani (2013) yang meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Peneliti terdahulu melakukan penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan terdaftar di Bursa Efek Bahrain, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Model penelitian ini menjelaskan pengaruh antara variabel independen yaitu kepemilikan *blockholder*, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah dan variabel kontrol terdiri dari ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas terhadap variabel dependen yaitu pengungkapan sukarela. Model penelitian dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

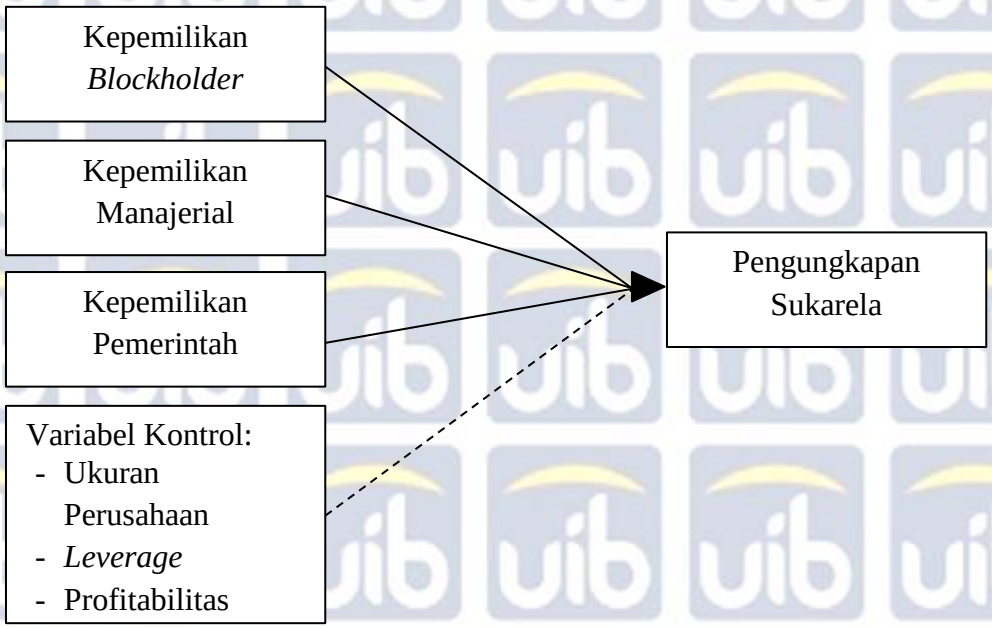

2.6 Perumusan Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan hipotesis untuk penelitian ini dengan menggunakan ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas sebagai variabel kontrol adalah sebagai berikut:

H1 : Kepemilikan *blockholder* berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan sukarela.

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela.

H3 : Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela.

H5 : *Leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan